

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agoes, R. *Etty Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran hukum Memasuki Abad XXI, mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaadmadja, SH. LLM.* Bandung: Penerbit Angkasa, 1998
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.* Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Cetakan ke-1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Bengen, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia.* Jakarta: Bappenas, 2005.
- Dahuri, Rohmin. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH.* Cetakan ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan, 1999
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- HR,Ridwan. *Hukum Administrasi Negara.* Cetakan ke-11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Idham, H. *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah.* Cetakan ke-1. Bandung: Alumni, 2004.
- Kartasapoetra, G. et al. *Hukum Tanah: Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah.* Cetakan ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Limbong, Bernhard. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.* Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Parlindungan, A.P, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Mandar Maju, 1991.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung, PT. Raja Grafindo, 2009.
- Simarmata, Ricardo. *Polemik Konsep Hubungan Negara dengan Tanah, di atas Realitas Problem Agraria*. Yogyakarta : Insist Press&Pustaka Pelajar, 2002.
- S Indrati, Farida Maria. *Ilmu Perundang-Undangan I*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Soetiknjo, Iman, *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 1994.
- S.W. Sumardjono, Maria. *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Cetakan ke-1. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Cetakan ke-2. Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta, PT. Grasindo, 2011.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, , 1999.
- Soehoed, A.R *Reklamasi Laut Dangkal*. Jakarta:Djembatan,2004.
- Wahab, A. Samik, *Perubahan Pantai dan Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998.

Wibisono, M. S. *Pengantar Ilmu Kelautan*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226*.

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

D. Artikel

Anonim. "Provinsi DKI Jakarta", <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/31/dki-jakarta>, 3 Mei 2016.

Departemen Hukum *PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk, KRONOLOGI PEMBENTUKAN PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK*, Jakarta, 2005

M. Puteri Rosalina, "Dilema Reklamasi Pantai Jakarta", <http://print.kompas.com/baca/2015/11/11/Dilema-Reklamasi-Pantai-Jakarta>, 11 November 2015.

Mia Chitra Dinisari. [Proyek reklamasi- ini 5 langkah penyelesaian kementerian lingkungan hidup](http://kabar24.bisnis.com). kabar24.bisnis.com, Diakses 10 Mei 2019

Santoso, Urip. “ Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Reklamasi Pantai”

Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor 2 Tahun 2015.

Sajchran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.